BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan meningkatnya akumulasi perkara di Pengadilan. Selain itu, institusional proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping Pengadilan yang bersifat memutuskan (*adjudikatif*) (Abdul Halim 2011:2). Berdasarkan dengan kehendak Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* (HIR), dimana hakim dapat mengambil peranan aktif untuk memberikan kesempatan terwujudnya perdamaian. Sehingga dengan adanya hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator diharapkan penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dengan baik.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Sedangkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (2) berisi ketentuan mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Lawrence R. Freedman (1986:37) mediasi merupakan proses beracara di Pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

Laura Nader dan Harry F. Todd (1999:224-225) menentukan tahapan suatu sengketa, yaitu: Pertama, pra konflik, yang mendasari rasa tidak puas seseorang; Kedua, konflik keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; Ketiga, sengketa di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Menurut Coser dalam Achmad Fedyani (1986:8) pertentangan atau perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan, pengaruh dan sumber daya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat dan kompleks melahirkan berbagai bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Permasalahan penyelesaian sengketa tetap merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam transaksi bisnis dalam setiap waktu. Dengan beragam sengketa yang dihadapi terutama pada abad 21 dimana sengketa semakin luas dan memiliki banyak corak sengketa. Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa internal antara para pihak yang mengadakan kesepakatan karena salah satu pihak memutuskan perjanjian secara sepihak *breach of contract*. Atau salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban *default* dalam usaha patungan atau pinjaman modal (M.Yahya Harahap 1997:167).

Perkembangan penyelesaian perkara di Pengadilan dewasa ini dengan menggunakan mediasi mulai tampak dan dikembangkan di Indonesia. Cara penyelesaian sengketa yang dipilih dengan penerapan Lembaga Damai dalam proses perkara perdata di Pengadilan, hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka pembatasan perkara Kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung. Dalam proses perkara perdata di Pengadilan perdamaian tidak hanya dapat diusahakan hakim pada sidang pertama saja, akan tetapi dapat terus dilakukan sebelum ada Putusan (Riduan Syahrani 2000:66).

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan Pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan Pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan *justitiabelen*, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah

dipikirkan suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan Pengadilan (Munir Fuady 2005:311).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menambah satu bab baru yaitu bab ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah di bidang perniagaan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pengaturan Pengadilan Niaga pada bab tersendiri pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap Pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Niaga dibentuk pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 1998. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;

2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu sengketa Hak Kekayaan Intelektual dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi. Di dalam konsideran dikatakan: “Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* HIR maupun Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.” Meskipun didorong adanya mediasi, di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diadakan pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) bagian (a) point pertama. Salah satu sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi yaitu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.

Sebuah perkara kepailitan, United Coal Indonesia yang dinyatakan pailit oleh kedua krediturnya yakni PT GMT Indonesia dan PT Palaran Indah Lestari. United Coal Indonesia mengaku mengalami kesulitan melakukan pembayaran utang sesuai proposal perdamaian yang sebagaimana dituangkan dalam perjanjian homologasi. Meski sudah ada perjanjian PT GMT Indonesia dan PT Palaran Indah Lestari justru melayangkan permohonan pembatalan perjanjian homologasi di Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat. Dalam proposal perdamaian yang telah dihomologasi tersebut United Coal Indonesia menawarkan pembayaran tagihan kepada para kreditur konkurennya dengan membayarkan Rp 20 juta di awal. Sisanya dicicil mulai Juli 2015 sebesar 12,5% setiap bulannya dan berakhir pada Januari 2017 atau satu tahun lebih (<http://kabar24.bisnis.com> diakses pada 25 November 2015 pukul 17:31 WIB).

Semua perkara perdata wajib menjalankan perdamaian sebelum masuk dalam jalur litigasi hal ini ditegaskan Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* HIR maupun Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* RBg, dalam perkara kepailitan mengapa tidak diusahakan perdamaian di awal. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatakan Hakim diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan Putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah Putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatakan debitor pailit dapat mengajukan perdamaian kepada kreditur. Namun tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme proses beracara mengenai upaya proses mediasi di Pengadilan Niaga.

Pengaturan mengenai mediasi secara khusus di Pengadilan Niaga belum ada, tapi perkara yang masuk dalam lingkup Pengadilan Niaga sendiri, dalam penyelesaiannya telah diatur tersendiri di dalam setiap Undang-Undang yang mengatakan bahwa para pihak dapat menempuh jalur

Arbitrase atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan perdamaian. Pengaturan kewajiban mengenai mediasi sesuai dengan perkara di Pengadilan Niaga yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan penyelesaian hak cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan.
2. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatakan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatakan Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.
4. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatakan Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor

Disisi lain para pelaku bisnis punya kewajiban untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, tapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi. Menghapuskan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Penghapusan tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perorangan. Selain prosesnya yang memakan banyak biaya, prosesnya panjang dan berbelit-belit. Sengketa bisnis yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi

mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri (Suyud Margono 2010:87).

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi mengatakan proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Niaga sangat menguntungkan karena mediasi di Pengadilan bersifat tertutup.

Suyud Margono (2010:87) Perundingan dalam sengketa bisnis antar pengusaha adalah proses yang disukai, walaupun masih ada keraguan mengenai kekuatan hukum dan pematuhan kesepakatan. Mediasi di Pengadilan dalam proses penyelesaiannya jika berhasil mencapai kesepakatan maka dikuatkan dengan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap. Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tiap tahunnya termasuk dalam jumlah yang besar. Pemasukan perkara dalam jumlah yang besar ini tentu saja memberatkan kinerja Mahkamah Agung. Maka diperlukan pengintegrasian mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan maka dirumuskan masalahnya adalah:

1. Apakah penghapusan lembaga mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

2. Bagaimanakah seharusnya lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penghapusan lembaga mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat biaya ringan.
2. Lembaga mediasi yang seharusnya dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Penghapusan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat teoretis:

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya mahasiswa magister ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan Niaga.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi sebagai penyelesaian

sengketa yang cepat dan murah di Pengadilan Niaga.

E. Keaslian Penelitian

Judul tesis Penghapusan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga. bukan plagiat atau duplikasi dari tesis yang pernah ada tapi hasil karya sendiri, tentu saja penulisan ini bukan merupakan hal yang baru. Penulisan sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya:

1. Sungarpin, Tahun 2008, Program Pasca Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Peranan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi pasca Perma No.2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”. Penelitian ini memiliki tujuan mengenai Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Pasca Perma No 2 Tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan penelitian hukum normatif. Rumusan masalah yaitu perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi di pengadilan, bagaimana pelaksanaan Perma Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Berdasarkan kesimpulan tesis ini, dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah pertama, semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Kedua, Perma mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai aturan namun belum ada sengketa yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Ketiga, kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui

mediasi dipengadilan adalah berkekuatan hukum karena kesepakatan mediasi ditetapkan sebagai akta perdamaian oleh hakim.

2. Wahyudi Kurniawan, Tahun 2015, Program Pasca Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, dengan Judul “Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta”. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis eksistensi mediasi oleh hakim mediator dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menganalisis kebutuhan hakim mediator dalam mediasi sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menganalisis faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri oleh hakim mediator merupakan penelitian normatif empiris. Rumusan masalah yaitu eksistensi mediasi oleh hakim mediator dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri oleh hakim mediator Berdasarkan kesimpulan tesis ini, mediasi oleh hakim mediator dalam sengketa perdata menjadi pilihan utama oleh para pihak, kebutuhan hakim mediator di pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta masih mencukupi, dan faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam sengketa perdata oleh hakim mediator adalah : sumber daya

manusia, pengetahuan masyarakat, dan peraturan tentang mediasi. Saran yang disampaikan, meningkatkan pelayanan mediasi di pengadilan, menambah jumlah hakim bersertifikat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi tentang mediasi, dan dibuat peraturan tentang mediasi yang lebih detail.

3. Fransiskus Holo Piran, Tahun 2013, Program Pasca Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul “ Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Mediasi Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Penelitian ini memiliki tujuan faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam menjalankan peran hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Rumusan masalah yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi kendala atau penghambat dalam menjalankan peran hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan kesimpulan tesis ini, (1) Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi mencakup: menyarankan atau menghimbau para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur mediasi, yang dilakukan pada saat tahap pra mediasi, memberi saran dalam pemilihan seorang mediator baik yang disediakan Pengadilan maupun dari luar pengadilan, melakukan pemantauan terhadap proses mediasi, dan melakukan

pengesahan akta perdamaian yang telah mendapat kesepakatan antar pihak yang bersengketa; (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peran Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi yakni: kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa, anjuran perdamaian Hakim lebih bersifat formalitas, keterbatasan keahlian mediator, koordinasi administrasi yang kurang lancar, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proses mediasi.

Dari ke-tiga penulisan tesis di atas adapun perbedaan dari penulisan tesis ini yaitu Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif mengenai penghapusan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Menggunakan pendekatan politik hukum dan perUndang-Undangan. Dalam penulisan tesis ini untuk menyimpulkan apakah lembaga mediasi dalam Pengadilan Niaga sudah tetap menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat biaya dan pelaksanaan lembaga mediasi yang seharusnya dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga.